

RANCANGAN DATABASE *E-BUDGETING*: UPAYA PENGENDALIAN DANA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nurul Lathifah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya

Email: nurullathifah.febiuinsa@gmail.com

Ana Toni Roby Candra Yudha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya

anatoniroby@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan menghasilkan database sistem e-budgeting untuk mengendalikan dana hibah pada Biro Administrasi Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (studi kasus biaya MTQ pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Jawa Timur). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatory untuk menggali penyebab permasalahan anggaran secara mendalam, mengajukan pertanyaan, dan menjawab permasalahan sehingga menemukan solusi yang dapat diaplikasikan di pemerintahan. Subjek penelitian ini adalah Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Objek penelitian ini adalah e-budgeting. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Administrasi Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan sistem aplikasi jsmas untuk pengendaliannya. Penerapan aplikasi jsmas memiliki beberapa kelemahan yaitu belum adanya kontrol dalam penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah (SPJ). Oleh karena itu, penerapan usulan e-budgeting ini diharapkan dapat mengendalikan dana hibah dalam mencapai kesesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah (SPJ) melalui rancangan database yang detail sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran sebagai laporan pertanggungjawaban dana hibah.

Kata kunci: Hibah, e-budgeting, Jsmas, Biro Administrasi Kemasyarakatan, LPTQ Jatim

PENDAHULUAN

Hibah yang diterima atau yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja negara. Akuntabilitas dalam keuangan negara tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun meliputi aspek penganggaran, mekanisme

pengeluaran/penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah. (Bultek SAP No. 13)

Saat ini belum tampak adanya upaya yang utuh, menyeluruh, sistemik, terintegrasi, terukur dan berkelanjutan untuk mengatasi penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial tersebut. Lemahnya sistem kontrol dana hibah dan bantuan sosial ini memberi peluang kepada para koruptor untuk melakukan aksinya dengan berbagai rekayasa laporan dan jurus andalannya. (Sacral: 2015)

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di SKPKD Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan dana hibah kepada masyarakat Jawa Timur selama lima tahun terakhir sebesar Rp 1.620.506.008.500,00 dengan jumlah lembaga penerima bantuan hibah sejumlah 18.310 lembaga. (Lihat Tabel 1.1.). Terdapat peningkatan jumlah hibah dari tahun 2010 hingga tahun 2013 tetapi terjadi penurunan di tahun 2014 begitupula jumlah lembaga penerima hibah juga mengalami hal yang sama. Kemungkinan hal ini terjadi karena pembatalan ataupun pengembalian dana hibah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1 1
Jumlah Pengeluaran Dana Hibah dan Lembaga Penerima Hibah Biro
Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi
Jawa Timur selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Total Dana Hibah	Jumlah Penerima Hibah
2010	Rp 189.195.056.000,00	2395 lembaga
2011	Rp 252.676.952.500,00	3129 lembaga
2012	Rp 408.618.000.000,00	3479 lembaga
2013	Rp 425.101.500.000,00	4884 lembaga
2014	Rp 344.914.500.000,00	4423 lembaga
TOTAL	Rp 1.620.506.008.500,00	18.310 lembaga

Sumber : Data Internal Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekdaprov
Jatim, 2014

Pemberian dana hibah terbesar pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur, Pramuka, dan LPTQ Provinsi Jawa Timur. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan keuangan LPTQ Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai objek penelitian karena LPTQ Provinsi Jawa Timur memperoleh dana hibah tahun 2014 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) tetapi pencairan dananya hanya Rp 4.300.000.000,00, dengan kata lain RAB yang terserap hanya Rp 4,3 M. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan di LPTQ Jatim yang direncanakan berbeda dengan realisasinya karena pertimbangan waktu.

Hal ini menarik untuk diteliti karena ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawabannya (laporan keuangannya) dengan RAB yang telah diusulkan di awal. Selain itu, penyusunan anggaran yang dilakukan oleh LPTQ Provinsi Jawa Timur juga masih manual sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dapat mengontrol penggunaan dana hibah tersebut sewaktu-waktu.

Pentingnya anggaran dalam proses pemberian dana hibah pemerintah maka diperlukan adanya sistem yang memudahkan dan mempercepat proses penganggaran penerima hibah sekaligus pengendali dana hibah yaitu *e-budgeting*. *E-budgeting* merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Melalui *e-budgeting*, pemerintah dapat melakukan pengendalian anggaran dengan baik karena proses penyusunan anggaran dapat dilakukan secara transparan, tepat waktu, anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dalam program kerja, kronologis anggaran dapat ditelusuri dengan jelas, dan pembuatan laporan seputar realisasi anggaran dapat dibuat dengan mudah. (Wardhani: 2015).

Permasalahan-permasalahan seperti perubahan RAB, tidak adanya *standard cost* dalam pemberian dana hibah di Biro Administrasi Kemasyarakatan harus segera diatasi, maka perlu disusun rancangan sistem *e-budgeting* dalam pemberian dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perancangan yang disusun hanya sampai dengan perancangan *database*. *E-budgeting* akan memudahkan dan mempercepat proses pemberian dana hibah serta pengendali pemberian dana hibah. *E-budgeting* diperlukan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi. Selain itu, *e-budgeting* diharapkan dapat menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang akan digunakan untuk membandingkan rencana anggaran dengan realisasi anggaran. LRA penting untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan lembaga penerima hibah. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan mengenai: Bagaimana rancangan sistem *e-budgeting* sebagai pengendali dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (studi kasus biaya MTQ pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Jawa Timur)?

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem pengumpulan dan pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Kieso, 2008: 72). Sistem informasi akuntansi juga

merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia, dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. (Bodnar, 2006:3).

Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas

Proses pembelian/hutang/pengeluaran kas adalah sebuah interaksi struktur orang-orang, peralatan, metode, dan kontrol yang dirancang untuk mencapai fungsi utama sebagai berikut (Gelinas, 2002:403):

1. Menangani rutinitas kerja departemen pembelian, departemen penerimaan, departemen hutang, departemen penggajian, dan kasir.
2. Mendukung kebutuhan keputusan pengelola departemen yang tercantum dalam butir 1.

Pengendalian Internal

Rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian internal (*internal control structure*) terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi. (Romney dan Paul, 2004: 229)

Audit Internal

Audit internal menurut IIA (Institute of Internal auditor) yang dikutip oleh Boynton (2001:980) yakni:

"Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes".

Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola).

Sistem Informasi Keuangan (*Financial Information System*)

Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Subsistem audit internal terdiri atas aktivitas-aktivitas oleh auditor internal perusahaan untuk menjaga integritas sistem perusahaan. Aktivitas-aktivitas output penting meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. (McLeod and Schell, 2007: 192).

Data Base Management Systems (DBMS)

Sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Sistem Manajemen Basis Data (*Data Base Management System-DBMS*) adalah peranti lunak yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses data bagi program aplikasi. (Laudon, 2009: 265-266)

Anggaran (Budgeting)

Anggaran (budget) merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Anggaran mempunyai posisi yang sangat penting. Anggaran diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. (Bastian, hal 163-164: 2006). Penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang (Supriyono, 1990:15).

E-budgeting

E-budgeting merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Melalui e-budgeting, pemerintah dapat melakukan pengendalian anggaran dengan lebih baik karena proses penyusunan anggaran dapat dilakukan secara lebih transparan, tepat waktu, anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dalam program kerja, kronologis anggaran dapat ditelusuri dengan jelas, dan pembuatan laporan seputar realisasi anggaran dapat dibuat dengan lebih mudah. (Wardhani, 2015).

Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem adalah proses modifikasi atau mengganti sebagian atau semua sistem informasi. Pengembangan sistem dilakukan oleh analis sistem, programmer, akuntan, dan lainnya. Siklus hidup pengembangan sistem yaitu perencanaan dan analisis, perancangan, dan implementasi. (Bodnar, 2008:437).

Pengembangan sistem informasi akuntansi dilaksanakan melalui tiga tahap utama yaitu:

1. Analisis Sistem (*system analysis*)

Tahap analisis adalah tahap paling awal dalam pengembangan sistem. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebutuhan informasi saat ini dapat dipenuhi oleh sistem yang sudah ada atau untuk mengadakan perbaikan terhadap sistem yang sedang digunakan. (Winarno, 2006: 9.8)

2. Desain Sistem (*system design*)

Setelah analisis sistem, tahap selanjutnya adalah desain sistem atau merancang sistem. Winarno (2006:9.10) menjelaskan bahwa tahap desain sistem atau tahap perancangan adalah proses untuk merancang sistem yang baru. Bodnar (2006:453) juga menyatakan bahwa desain merujuk pada penciptaan model baru atau modifikasi sistem. Desain sistem merupakan proses merancang secara rinci solusi yang telah dipilih dalam proses analisis. Desain sistem dimulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

3. Implementasi Sistem (*system implementation*)

Tahap terakhir setelah sistem dirancang adalah implementasi sistem atau penerapan sistem yang telah dirancang. Implementasi sistem adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan, dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan perubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. (Mulyadi, 2001:53).

Hibah Pemerintah

Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2012 menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan memuat 6 (enam) tahapan dalam melakukan penelitian yaitu perencanaan (plan), desain (design), persiapan (prepare), pengumpulan (collect), analisa (analyze), dan pelaporan (reporting). (Yin, 2014)

Rencana Penelitian (Plan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *eksplanatory*, di mana menggali penyebab permasalahan secara mendalam, mengajukan pertanyaan, dan menjawab permasalahan sehingga menemukan solusinya.

Desain Penelitian (Design)

Desain studi kasus yang digunakan dalam penelitian adalah *single-case study* (studi kasus tunggal) melalui observasi pada sistem pengendalian dana hibah (RAB dan laporan keuangan) untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang masih menjadi kendala dalam mengendalikan dana hibah.

Persiapan Penelitian (Prepare)

Dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian pada Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Jawa Timur, maka protokol studi kasus (case study protocol) akan dikembangkan dan digunakan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penganggaran dana hibah di Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Jawa Timur?
- b. Bagaimana proses pencairan dana hibah di Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Jawa Timur?
- c. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Jawa Timur?
- d. Bagaimana sistem pengendalian dana hibah Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Jawa Timur?
- e. Apa saja kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan atas sistem pengendalian dana hibah yang telah diimplementasikan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Jawa Timur?
- f. Permasalahan-permasalahan apa saja yang dialami oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Jawa Timur dengan adanya sistem pengendalian dana hibah yang ada saat ini?
- g. Bagaimana rancangan database sistem *e-budgeting* pada Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Jawa Timur?

Pengumpulan Data (Collect)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pegawai Biro Administrasi Kemasyarakatan dan bendahara LPTQ Jawa Timur. Observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan awal yang ada di Biro Administrasi Kemasyarakatan, kemudian dokumentasi untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), bukti-bukti pencairan dana hibah.

Analisis Data

Melakukan analisa atas hasil dokumentasi tentang sistem pengendalian dana hibah Biro Administrasi Kemasyarakatan mulai dari proses pencairan hingga pelaporan keuangan. Sehingga dengan menerapkan rancangan sistem *e-budgeting* diharapkan dalam pemberian dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan memudahkan dan mempercepat proses pemberian dana hibah, serta sebagai alat pengendali pemberian dana hibah untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi. Selain itu, di dalam *e-budgeting* nantinya diharapkan dapat menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang akan digunakan untuk membandingkan rencana anggaran dengan realisasi anggaran. Hal ini penting untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan lembaga penerima hibah.

Pelaporan (Reporting)

Pada tahap ini dari laporan penelitian akan menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan penelitian yang akan dibagikan kepada pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru untuk meningkatkan pengendalian dana hibah Pemprov Jatim pada lembaga penerima hibah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Proses pemberian dana hibah Provinsi Jawa Timur dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu proses penganggaran, pencairan dana, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan di Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Provinsi Jawa Timur.

Penganggaran Dana Hibah

Pemberian dana hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah badan usaha milik negara, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dengan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur menunjuk KPPKD/SKPD/Biro untuk melakukan Evaluasi Usulan, dalam penelitian ini dilakukan pada Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda

Provinsi Jawa Timur. Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi pada proses penyusunan Rancangan KUA/PPAS sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rekomendasi KPPKD/SKPD/Biro dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD. RKA PPKD dan RKA SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. DPA PPKD dikelompokkan dalam Rincian DPA PPKD.

Tabel 4.1 Penyerapan Anggaran Hibah pada Biro Administrasi Kemasyarakatan Tahun 2015

Keterangan	Jumlah	Lembaga	%
Alokasi Anggaran	Rp 441.237.500.000,00	2.818	100
Realisasi (SP2D + SPM)	Rp 271.940.167.100,00	1.227	61,63
Dalam Proses pencairan (sudah disurvei dan SK tapi belum SPM)	Rp 117.257.332.900,00	223	26,58
Proses SK Gubermur (sudah disurvei)	Rp 16.679.500.000,00	329	03,78
Sisa lembaga (belum survei)	Rp 35.360.500.000,00	1.039	08,01

Sumber: Data Internal Biro, 2015

Anggaran hibah pada Biro Administrasi Kemasyarakatan pada tahun 2015 (Tabel 4.1) sebesar Rp 441.237.500.000,00 dengan jumlah penerima hibah 2818 lembaga. Realisasi hingga Juli 2015 sebesar Rp 271.940.167.100,00 (61,63%) dengan 1227 lembaga, sisanya sebesar Rp 169.297.332.900,00 (38,37%) dengan 1591 lembaga masih dalam proses hingga akhir tahun anggaran.

Pencairan Dana Hibah

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah. NPHD memuat ketentuan mengenai: pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah/besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan hibah, dan tata cara pelaporan hibah. Penandatanganan NPHD Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan. Mekanisme pencairan dana hibah dapat dilihat pada Gambar 4.2.

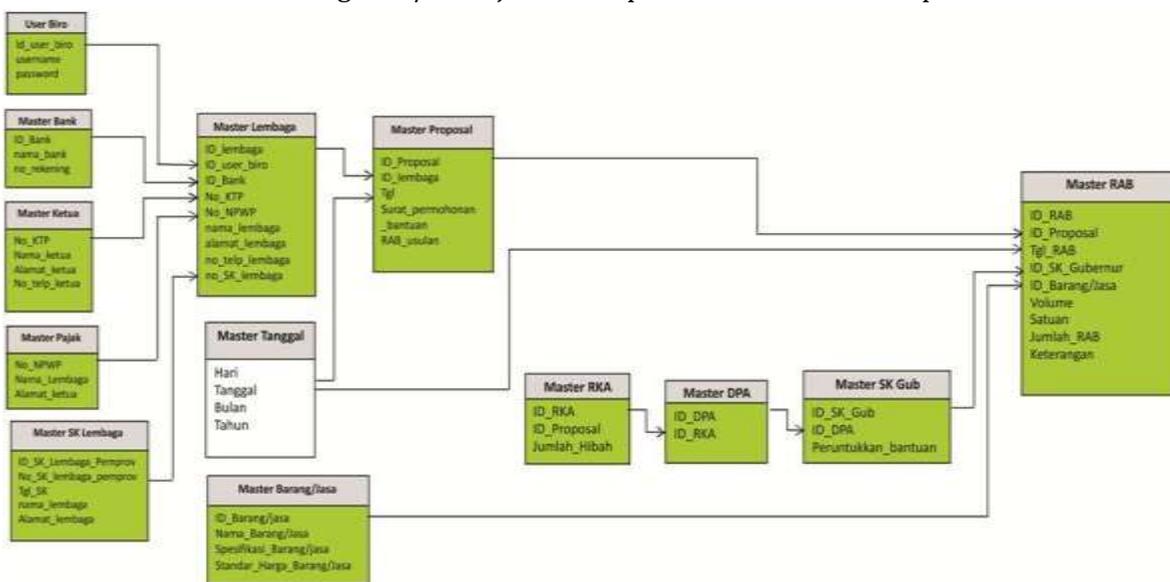
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Kemasyarakatan sebagai kelengkapan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan. Biro Administrasi Kemasyarakatan membuat rekapitulasi laporan penggunaan hibah setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada PPKD. PPKD menyusun Laporan Realisasi belanja hibah pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Gubernur. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Kemasyarakatan sebagai kelengkapan monitoring dan evaluasi. Hibah berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan hibah barang dalam neraca SKPD terkait. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah, meliputi:

- a. Usulan tertulis dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah yang didalamnya memuat nama lembaga, alamat, kegiatan, dan besaran nilainya;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian hibah berupa



barang dan/atau jasa.

Gambar 4.2. Mekanisme Pencairan Dana Hibah

Sumber: Data Internal Biro, 2014

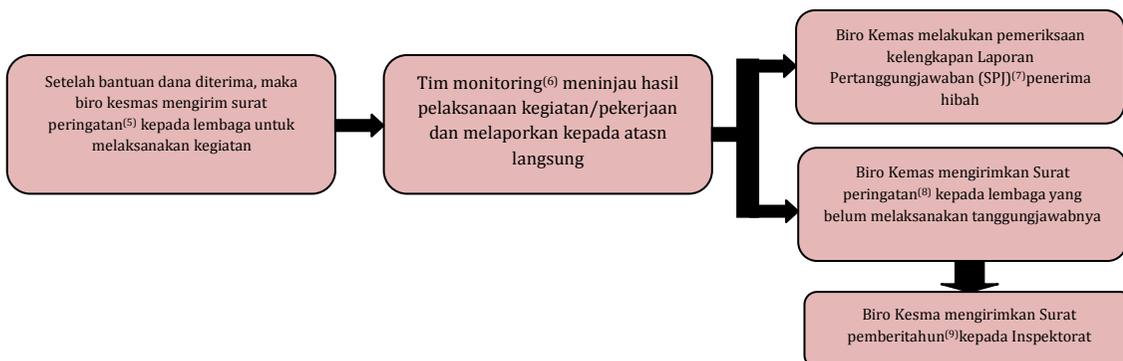
Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi:

- Laporan penggunaan hibah;
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.

Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Kemasyarakatan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan yang didanai dari hibah selesai dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam NPHD. Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang pencairannya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran penyampaian laporan penggunaan dana hibah daerah tidak melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek

pemeriksaan. Mekanisme pelaporan/pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Apabila dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Biro Administrasi Kemasyarakatan. Dan apabila akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, penerima belanja hibah wajib merevisi (*adendum*) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Gubernur dengan tembusan Biro Administrasi Kemasyarakatan. Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 4.3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

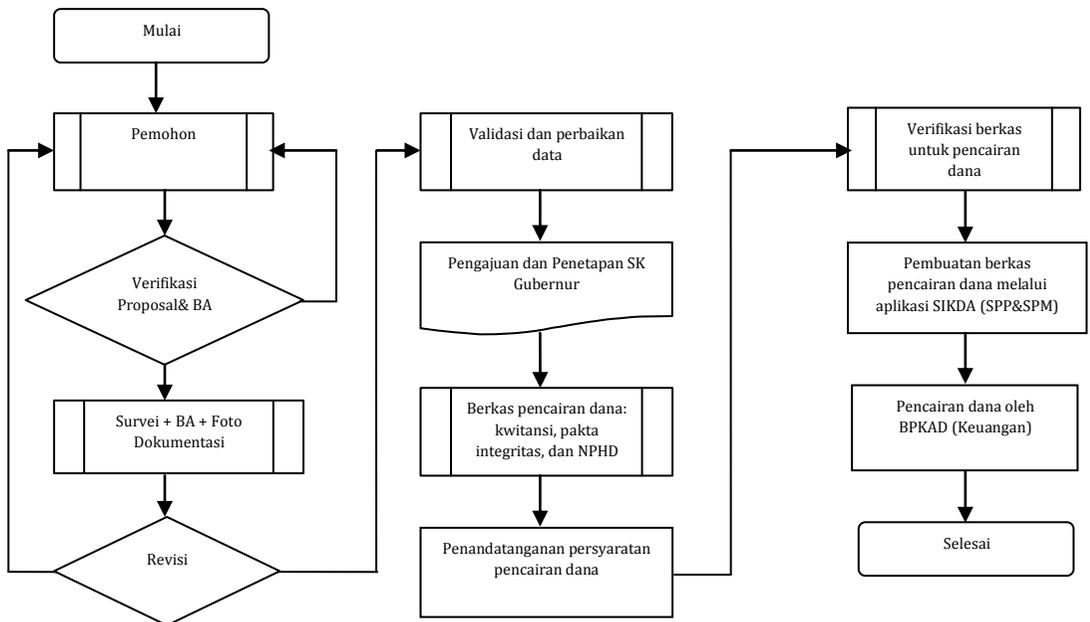
Sumber: Data Internal Biro, 2014

Analisa Pengendalian Dana Hibah Saat ini

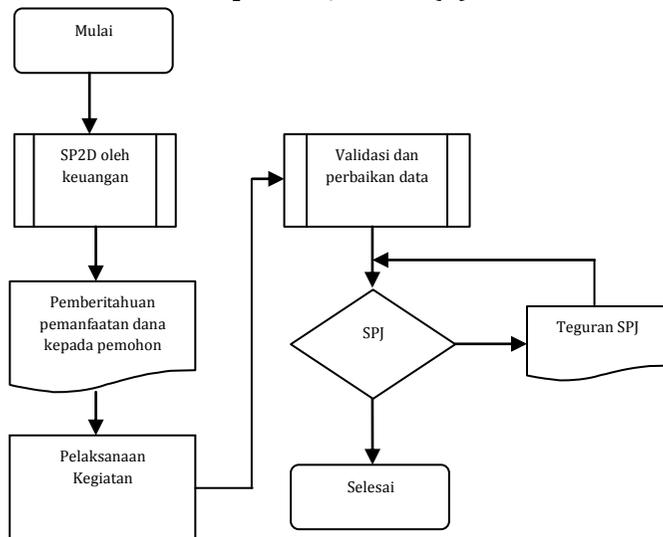
Pengendalian dana hibah di Biro Administrasi Kemasyarakatan dilakukan menggunakan sistem (*by system*) yaitu aplikasi jasmas. Aplikasi jasmas merupakan aplikasi berbasis web yang menggunakan aplikasi Open Source (berbasis PHP yang umum dijumpai pada hosting-hosting di internet, menggunakan database MySQL). Diagram alir (flowchart) aplikasi jasmas terdapat pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5.

Pengendalian dana hibah yang sudah tersistem (*by system*) di dalam Biro Administrasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang terjadi (Tabel 4.2) yaitu di pihak internal pemberi hibah (pemerintah) seperti perubahan regulasi yang tidak menentu sehingga pelaksanaan harus mengikuti peraturan yang baru,

adanya perbedaan nama dan alamat lembaga pada DPA-SKPKD dengan riil, kurangnya dukungan SDM, *human error* ketika input data, dan tidak adanya standar pelaporan dana hibah. Sedangkan di pihak eksternal penerima hibah (lembaga/masyarakat), yaitu kurangnya pemahaman lembaga terhadap pembuatan proposal, keterlambatan lembaga dalam memenuhi kelengkapan dan persyaratan administrasi, lemahnya pemahaman dan kurang patuhnya lembaga dalam pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban Keuangan (SPJ), tidak adanya kesesuaian SPJ dengan RAB, laporan yang berbeda-beda antar lembaga.



Gambar 4.4. Flowchart Aplikasi Jasmas (1)



Gambar 4.5. Flowchart Aplikasi Jasmas (2)

Sumber: Data Internal Biro, 2014

Tabel 4.2
Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Pemberian Dana Hibah Biro Administrasi Kemasyarakatan Setdaprov Jatim

Internal	Eksternal
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan regulasi. 2. Adanya ketidaksesuaian nama lembaga dan alamat yang ada dalam DPA-SKPKD dengan kondisi riil saat Tim Observasi. 3. Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM). 4. Human error dalam input data, 5. Tidak Standar pelaporan dana hibah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman dalam pembuatan proposal. 2. Keterlambatan lembaga dalam memenuhi kelengkapan dan persyaratan administrasi. 3. Lemahnya pemahaman dan kurang patuhnya lembaga dalam pembuatan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas dana hibah yang diterima (Tidak adanya kesesuaian SPJ dengan RAB dan keterlambatan pelaporan dan Laporan yang berbeda-beda antar lembaga penerima hibah

Sumber: Data olahan, 2015

Perancangan Sistem *E-Budgeting*

Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah (SPJ) seringkali terlambat dan adanya ketidaksesuaian antara Rincian Anggaran Belanja (RAB) dengan laporan penggunaan dana yang telah dibuat (SPJ), hal itu terjadi tanpa adanya pemberitahuan/laporan terlebih dahulu sehingga lembaga bisa mengubah RABnya sewaktu-waktu serta menggunakan standar harga yang dibuat sendiri. Belum adanya kontrol dalam hal ini dan di dalam aplikasi jasmas belum mengakomodir sistem kontrol ini.

Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang berbeda-beda antar lembaga penerima hibah juga menyebabkan tidak terlihat kesesuaian SPJ dengan RAB. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan tentang standar laporan penggunaan dana hibah.

Oleh sebab itu, untuk mengendalikan dana hibah dalam anggaran dan penetapan standar biaya, serta nantinya menghasilkan laporan realisasi anggaran yang sama maka diusulkan sebuah sistem yaitu sistem *e-budgeting*, sebuah sistem pembuatan anggaran di lingkungan pemerintahan provinsi khusus untuk belanja hibah. Dalam sistem ini untuk membuat sebuah anggaran, dibutuhkan komponen-komponen penyusun dimana komponen-komponen penyusun tersebut merupakan hasil dari survei di lapangan. Komponen penyusun yaitu: Standar Harga

Satuan (standard cost). Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan lembaga penerima hibah dimanapun lokasinya. Pengguna Sistem *e-budgeting* dibagi menjadi 6 yaitu :

1. Lembaga Penerima Hibah (Masyarakat Jatim)
Merupakan lembaga yang menerima bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui SKPKD (Biro Administrasi Kemasyarakatan) yang mendapatkan anggaran belanja hibah dari APBD untuk kepentingan masyarakat Jatim.
 - a) Mengisi rincian anggaran sesuai dengan anggaran yang diberikan
 - b) Setiap lembaga penerima hibah memiliki login/akses ke *e-budgeting*
 - c) Mengisi rincian realisasi penggunaan dana hibah dengan menyertai bukti pengeluaran
 - d) Melaporkan penggunaan dana hibah
2. Tim Peneliti (Biro Administrasi Kemasyarakatan)
Merupakan sekelompok orang dari beberapa satuan kerja yang ditunjuk untuk memonitoring anggaran dari lembaga penerima hibah agar anggaran tersebut sesuai dengan limit yang ditentukan.
 - a) Berhak untuk mengunci kegiatan yang sudah sesuai
 - b) Merasionalisasikan dan menyesuaikan komponen
 - c) Mengedit RKA
3. Tim Data (Biro Administrasi Kemasyarakatan)
Merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan survei dan kemudian membuat komponen penyusun dan menentukan apakah komponen tersebut tidak kena pajak atau kena pajak.
 - a) Berhak untuk memasukkan komponen ke dalam *e-budgeting*.
 - b) Berhak untuk merubah harga komponen yang sudah ada dalam *e-budgeting*.
 - c) Berhak mengunci komponen agar tidak dapat dipilih dalam menyusun RKA.
 - d) Berhak menghapus komponen yang sudah terdapat dalam *e-budgeting*.
4. BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah)
Merupakan salah satu satuan kerja di Pemprov Jatim sebagai bagian akuntansi yang ditunjuk untuk menentukan program dan bidang suatu anggaran dalam tiap satuan kerja, tujuannya agar dapat dilihat secara langsung nilai per program serta menetapkan anggaran dan melakukan otorisasi atas pencairan dana hibah yang diberikan.
 - a) Menetapkan dana dari APBD dengan adanya dokumen DPA
 - b) Melakukan otorisasi pencairan dana hibah melalui dokumen SP2D
 - c) Menerima Laporan Realisasi Anggaran
5. Bank Jatim

Mencairkan dana hibah dengan mentransfer dana hibah ke rekening lembaga penerima hibah.

6. Administrator (Biro Administrasi Kemasyarakatan)

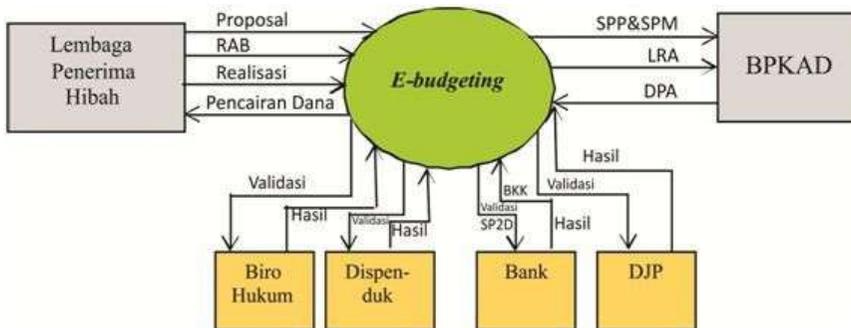
a) Merupakan *user* yang dapat melakukan manajemen *user, database*, dan dapat mengakses semua hak user lainnya, seperti :

1. Mengunci dan membuka akses *user*
2. Mengunci usulan RAB yang diusulkan lembaga penerima

hibah.

Diagram Konteks dan Data Flow Diagram (DFD)

Diagram konteks (Gambar 4.17) ini dibuat untuk membatasi sistem dan menunjukkan adanya interaksi sistem dengan komponen diluar sistem, yang dimana merupakan gambaran sistem secara luas. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan input ke sistem atau output dari sistem.



Gambar 4.17. Usulan Diagram Konteks Sistem E-Budgeting

Sumber: Hasil Olahan, 2015

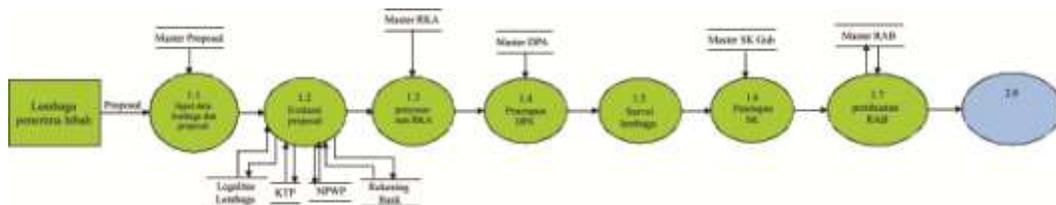
Gambar 4.17 menunjukkan hubungan lembaga penerima hibah, bagian akuntansi, dan pihak eksternal yang berhubungan pada proses pemberian dana hibah. Proposal, RAB, dan realisasi merupakan contoh aliran data yang masuk dari lembaga penerima hibah ke dalam proses sistem. Sedangkan contoh aliran data yang diterima lembaga penerima hibah adalah dokumen pencairan dana. Data DPA merupakan aliran data yang masuk ke sistem dari bagian akuntansi/keuangan. Sedangkan aliran data yang diterima oleh BPKAD adalah Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Segala aktivitas lembaga penerima hibah, bagian akuntansi, dan pihak eksternal berpusat pada database



sistem *e-budgeting*, di mana sistem tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) proses (Gambar 4.18), yakni penganggaran, pencairan dana, dan pelaporan.

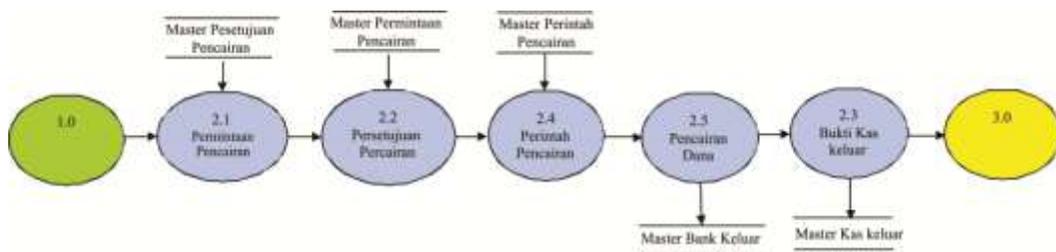
Gambar 4.18 Usulan DFD level 0 Sistem *E-Budgeting*

Sumber: Hasil Olahan, 2015



Gambar 4.19 Usulan DFD level 1 Diagram 2 Sistem *E-Budgeting* untuk Proses Penganggaran

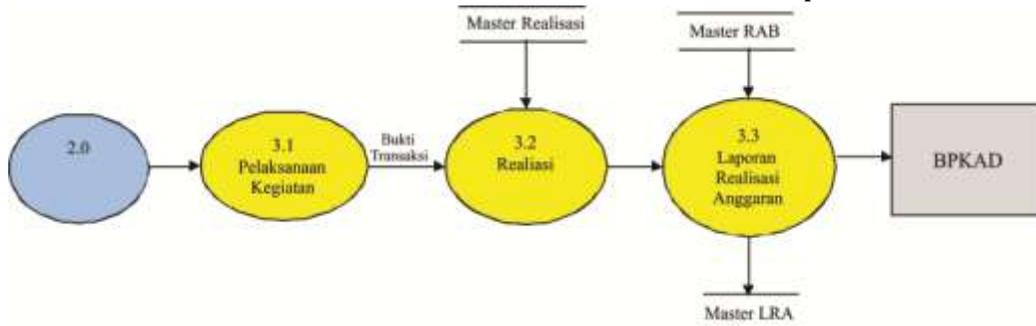
Sumber: Hasil Olahan, 2015



Gambar 4.20 Usulan DFD level 1 Diagram 2 Sistem *E-Budgeting* untuk Proses Pencairan Dana Hibah

Sumber: Hasil Olahan, 2015

Kedua, proses pencairan dana hibah (Gambar 4.20) dilakukan setelah lembaga penerima hibah input RAB. Setelah itu, pengajuan permintaan pencairan dengan dibuatnya dokumen pencairan yaitu Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Surat Pertanggungjawaban (SPTJ), Kwitansi, dan Pakta Integritas lalu ditandatangani oleh lembaga penerima hibah kemudian diajukan persetujuan pencairan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Hibah dan Bendahara Pembantu Hibah Daerah di Biro Administrasi Kemasyarakatan dengan keluarnya dokumen SPP dan SPM. Setelah itu, dikeluarkan dokumen SP2D oleh BPKAD untuk proses



pencairan dana di Bank Jatim sebagai perintah pencairan dana hibah melalui transfer dana ke rekening lembaga penerima hibah.

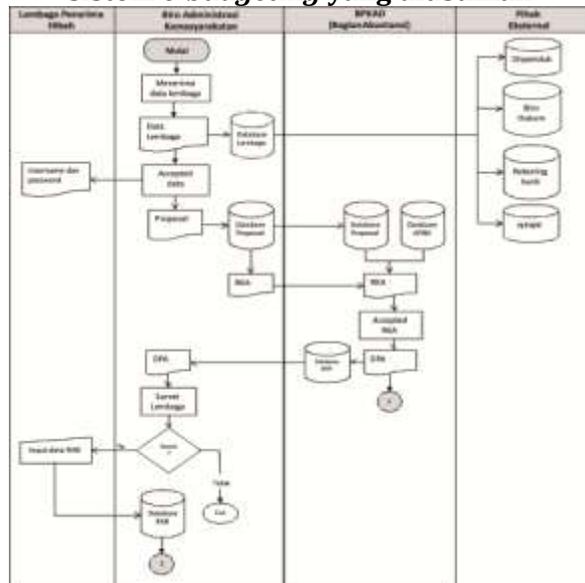
Gambar 4.21 Usulan DFD level 1 Diagram 3 Sistem *E-Budgeting* untuk Proses Pelaporan Realisasi Anggaran

Sumber: Hasil Olahan, 2015

Ketiga, Proses Pelaporan (Gambar 4.21) setelah dana cair, lembaga penerima hibah segera melaksanakan kegiatan sesuai peruntukkan dan merealisasikan dana sesuai RAB dengan input realisasi dalam sistem disertai bukti-bukti pengeluaran. Kemudian dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh lembaga penerima hibah yang diterima oleh BPKAD.

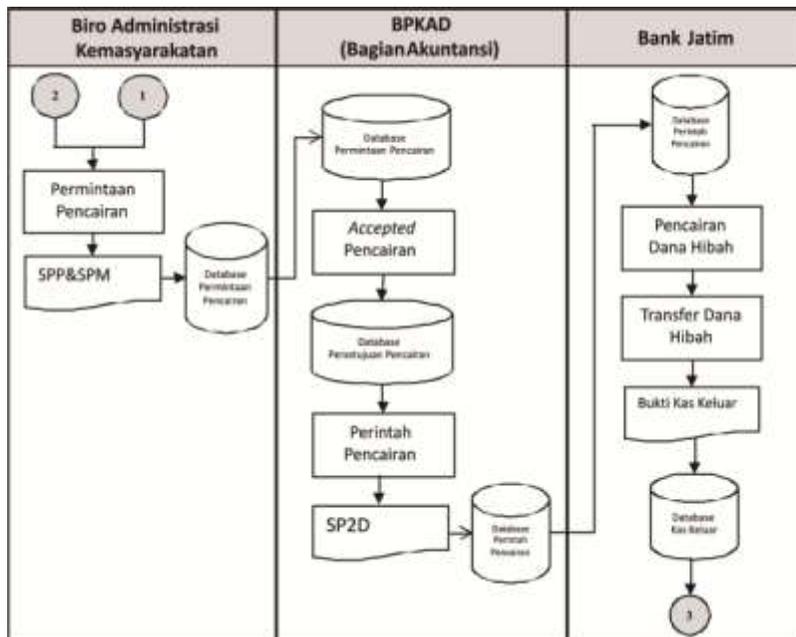
Bagan Alir (Flowchart)

Tabel 4.4 Flowchart Proses Penganggaran sistem *e-budgeting* yang diusulkan



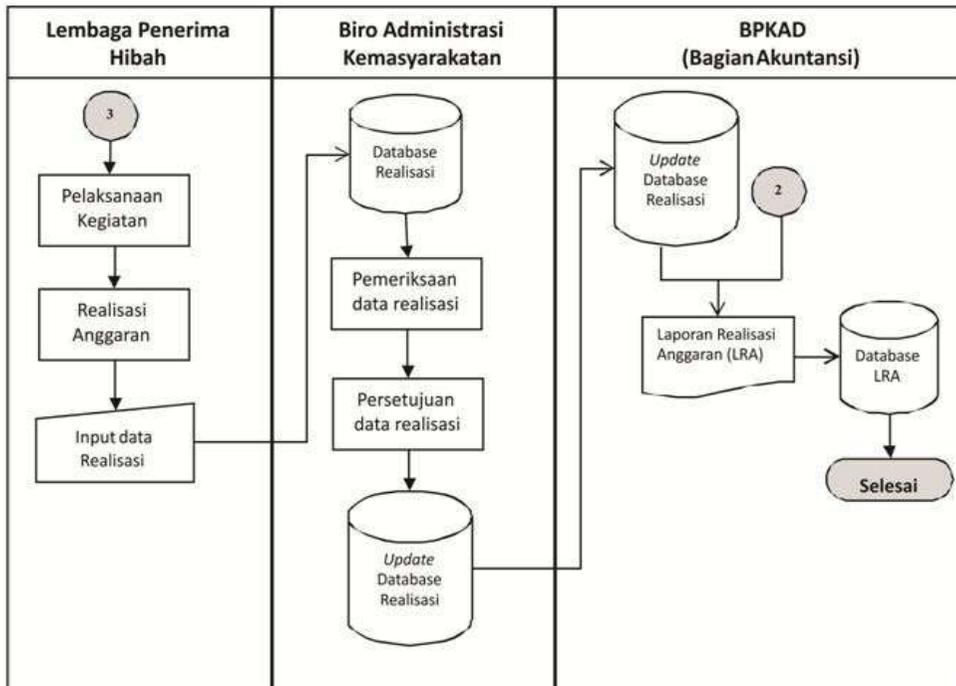
Sumber: Hasil Olahan, 2015

Tabel 4.5 Flowchart Proses Pencairan Dana Hibah sistem *e-budgeting* yang diusulkan



Sumber: Hasil Olahan, 2015

Tabel 4.6 Flowchart Proses Pelaporan/Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah sistem *e-budgeting* yang diusulkan



Sumber: Hasil Olahan, 2015

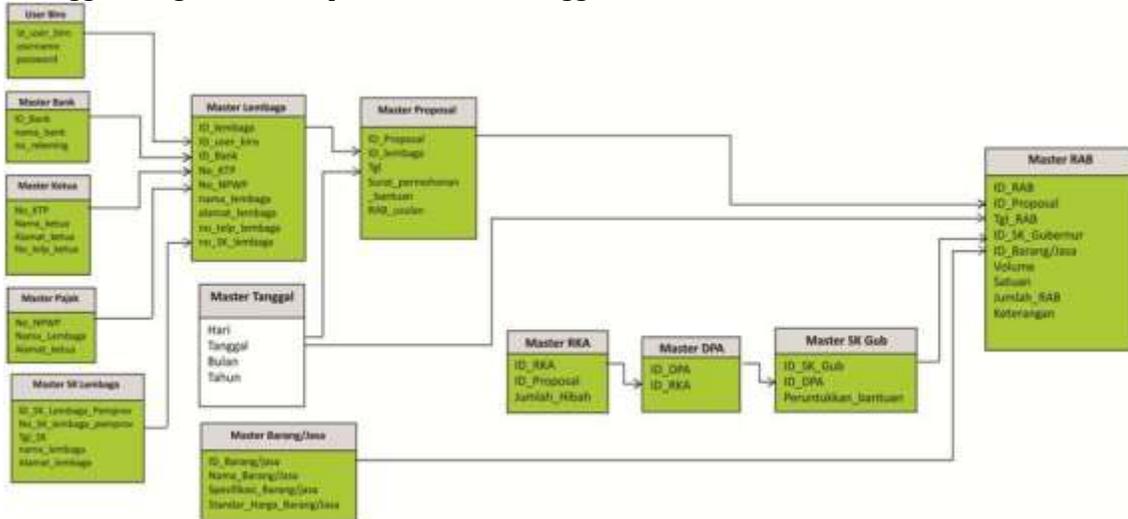
Database Management System

Database adalah kumpulan dari data yang berhubungan antar satu dengan yang lainnya untuk memusatkan data dan mengendalikan redundansi data, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem komputerisasi karena merupakan database dalam menyediakan informasi bagi pengguna.

Sistem Manajemen Basis Data (*Data Base Management System-DBMS*) adalah peranti lunak yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses data bagi program aplikasi.

Rancangan *Entity Relationship Diagram (ERD)* Databasesistem *e-budgeting* menunjukkan hubungan database dalam menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). ERD Database dibagi dalam 3 bagian yaitu (1) ERD proses penganggaran (Gambar 4.22) yang menunjukkan proses dalam menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), (2) ERD proses pencairan (Gambar 4.23) yang menunjukkan proses dalam mencairkan dana hibah, dan (3) ERD proses

pelaporan (Gambar 4.24) yang menunjukkan proses pelaporan/pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang membandingkan RAB dengan realisasi/penggunaan dana hibah sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran.

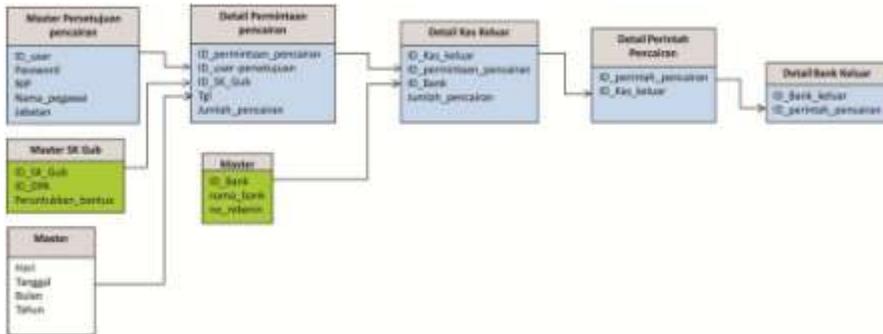


Gambar 4.22 Entity Relationship Diagram (ERD) Database Proses Penganggaran sistem e-budgeting yang diusulkan

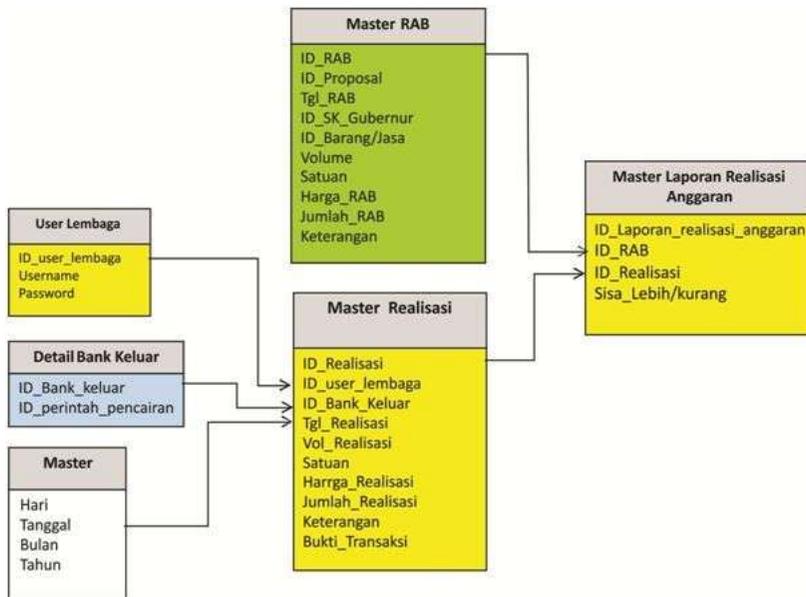
Sumber: Hasil olahan, 2015

Output Sistem E-budgeting

Output pada sistem e-budgeting ini terdiri atas 3 (tiga) output. Output pertama adalah data Rencana Anggaran Biaya (RAB). Output ini menunjukkan rincian biaya penggunaan dana hibah yang diberikan kepada lembaga. Data RAB juga menjadi *input* untuk data realisasi dan data pencairan dana. Output kedua adalah data realisasi. Output ini menunjukkan pengeluaran-pengeluaran dana hibah (realisasi penggunaan dana) disertai bukti pengeluaran. Dan output ketiga adalah data laporan pertanggungjawaban. Output ini menunjukkan laporan keuangan penggunaan dana hibah yang terdiri dari data RAB Acc dan data realisasi.



Gambar 4.23 Entity Relationship Diagram (ERD) Database Proses Pencairan Dana Hibah sistem e-budgeting yang diusulkan
Sumber: Hasil olahan, 2015



Gambar 4.24 Entity Relationship Diagram (ERD) Database Proses Pelaporan/Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah sistem e-budgeting yang diusulkan
Sumber: Hasil olahan, 2015

Audit Internal

Sistem informasi akuntansi menghadapi berbagai bentuk risiko dan ancaman. Semua risiko dan ancaman tersebut harus diadukan (kalau bisa) atau paling tidak diminimalkan pengaruhnya terhadap sistem yang dijalankan oleh Biro Administrasi Masyarakat. Tabel 4.7 merupakan pengendalian internal secara umum dalam mengatasi risiko/ancaman

dari aktivitas dalam sistem penganggaran dan pelaporan dana hibah melalui sistem *e-budgeting*:

Tabel 4.7 Pengendalian Internal Sistem *E-budgeting*

No	Risiko dan Ancaman	Pengendalian
1.	Perubahan RAB sewaktu-waktu	- Adanya <i>lock</i> pada sistem <i>e-budgeting</i> sehingga RAB tidak bisa dirubah sewaktu-waktu
2.	Perubahan RAB dan realisasi oleh pihak lain	- Adanya <i>login</i> username dan password masing-masing lembaga sehingga tidak bisa membuka data lembaga lain serta adanya <i>safety</i> pada sistem apabila terjadi perubahan maka akan terekam oleh sistem.
3.	Harga satuan yang berbeda-beda antar lembaga	- Adanya standar harga dalam sistem sehingga lembaga tidak bisa asal memasukkan harga satuan.

Sumber: Hasil olahan, 2015

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka didapatkan kesimpulan bahwa Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur menggunakan sistem aplikasi jasmas untuk pengendaliannya. Penerapan aplikasi jasmas memiliki beberapa kelemahan yaitu belum adanya kontrol dalam penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah (SPJ). Penerapan usulan *e-budgeting* dapat mengendalikan dana hibah dalam mencapai kesesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah (SPJ) melalui rancangan database yang detail sekaligus dapat menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran.

Saran penulis untuk Biro Adminitrasi Kemasyarakatan, sebaiknya dilakukan penerapan sistem *e-budgeting* dalam proses pemberian dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan penyempurnaan sistem aplikasi jasmas sehingga sinkron dengan sistem *e-budgeting* sehingga memudahkan Biro Administrasi Kemasyarakatan dalam mengontrol dana hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2015. "E-Budgeting." <https://bp.surabaya.go.id/uploads/Manual-Budgeting-dinas.pdf>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2018
- Anonim. *E-budgeting: Changing Face of Corporate Finance*. *themanagementor.com*. Diakses pada tanggal 30 Juni 2018
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Bodnar, Georger H. And William S. Hopwood. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9*. Yogyakarta: Andi
- Buletin Teknis SAP No. 13 tentang Akuntansi Hibah Entitas Hukum Indonesia. 2015. "Dua Orang Dijadikan Tersangka Dana Hibah Kadin." <http://www.entitashukum.com/dua-orang-dijadikan-tersangka-dana-hibah-kadin/>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2015.
- Gelinas, Ulrics J., et all. 1990. *Accounting Information Systems*. Massachusetts, USA: PWS-KENT Publising Company.
- Gelinas, Ulric J. And Richard B. Dull. 2008. *Accounting Information Systems*. United States of America: South Western Cengage Learning
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hall, James A, dkk. 2008. *Accounting Information Systems Sixth Edition*. United State of America: South Western Cengage Learning.
- Hornyak, Steve. 1998. *Budgeting Made Easy*. *Management Accounting* 80.4 (Oct 1998):18-23.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002
- Laudon, Kenneth C. dan Jane P. Laudon. 2009. *Management Information System 10th edition (Terjemahan)*. Jakarta: Salemba Empat
- McLeod, Raymond and George P. Schell. 2007. *Management Information Systems Tenth Edition*. United State of America: Pearson Prentice Hall.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. 2001. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Universitas GajahMada Yogyakarta.2001.
- Pemkot Surabaya. 2015. "E-Budgeting." <https://budgeting.surabaya.go.id/new portal/>
- Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan,

- dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- PSAK No. 61. 2010. Akuntansi Hibah Pemerintah dan pengungkapan Bantuan Pemerintah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan: IAI.
- Prasetyo, Daniel Hary. 2006. *Penerapan E-Budgeting pada Proses Pembuatan Rencana Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya*. Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi III Program Studi MMT-ITS, Surabaya 4 Pebruari 2006.
- Romney, Marshall B., and Paul John Steinbart. 2006. *Accounting Information Systems Tenth Edition*. United States of America: Pearson Education International
- Romney, Marshall B., and Paul John Steinbart. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Sembilan Terjemahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sacral, Arif. 2015. *Penetapan Dua Petinggi Kadin Provinsi Jatim sebagai Tersangka Korupsi Merupakan Dorongan Keras Kepada Gubernur dan Pimpinan DPRD Jatim untuk segera Tingkatkan Soliditas Sistem Kontrol Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Jawa Timur*. <http://transformasijawatimur.blogspot.com/2015/02/penetapan-dua-petinggi-kadin-provinsi.html>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2015
- Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemberian Bantuan Hibah di Biro Administrasi Kemasyarakatan. 2014.
- Yin, Robert. K. 2014. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Wagner, Mary Jo. 2005. Cutting the cords. *The American City & County* 120.13 (Dec 2005):38-41.
- Winarno, Wing Wahyu. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi edisi 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN